

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi keuangan sektor publik menjadi fenomena baru dan berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dilakukan dan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan.(Pebriani, 2019)

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini mengalami perubahan dan perkembangan sistem yaitu otonomi daerah. Munculnya otonomi daerah di Indonesia dikarenakan adanya tuntutan reformasi. Berawal dari diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 tahun 1999 yang juga diubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut UU Nomor 12 tahun 2008, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, karena maju atau tidaknya suatu daerah dapat terlihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengurus wilayahnya.

Dalam hal sektor publik laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik dan laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan yaitu salah satunya dilakukan secara transparan. Transparansi dan akuntabilitas ini

harus ditunjukkan kepada publik. Selain itu diperlukan tenaga-tenaga yang ahli dibidang akuntansi agar laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, artinya bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yakni: (a) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (b) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (c) opini Tidak Wajar, dan (d) Pernyataan Menolak dalam memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Bastian (2011:194) menyatakan, terdapat lima jenis pendapat yang diberikan, yaitu: (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) Pendapat wajar dengan pengecualian, (4) Pendapat tidak wajar, (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat. (Vidyasari, 2021)

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diantaranya adalah penyalahgunaan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pengenaan ganti rugi tanah yang belum sesuai ketentuan, indikasi penerimaan suap/gratifikasi oleh penyelenggara Negara, pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung teknis yang belum sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, belum memadainya penatausahaan dan pengamanan aset tanah, serta penatausahaan dan pengawasan terhadap kerjasama daerah dengan pihak ketiga atas aset tanah yang belum optimal.

Atas temuan-temuan terkait, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas nilai Belanja Modal Tanah sebesar Rp254.142.199.442,00 dan Aset Tetap Tanah sebesar Rp7.234.326.593.141,00.

Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi ganti rugi atas lahan SD Negeri Bojongrawalumbu I dan VIII sebesar Rp21.850.000.000,00 dan realisasi ganti rugi atas lahan Polder 202 dan Polder Kranji sebesar Rp42.043.793.000,00 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Atas kondisi terbut, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut sehingga opini yang diberikan terhadap LKPD Kota Bekasi TA 2021 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (jabar.bpk.go.id, 2022)

Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi TA 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kota Bekasi mengalami penurunan. Pemerintah Kota Bekasi telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 6 tahun berturut-turut kebelakang yaitu pada tahun 2016-2020. Tetapi Pemerintah Kota Bekasi tidak dapat mempertahankan opini tersebut untuk TA 2021 ini dikarenakan banyaknya temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting karena akuntabilitas sebagai bentuk dari pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi laporan keuangan yang berkualitas harus menerapkan akuntabilitas didalamnya agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih berkualitas dan informasi-informasi didalamnya menjadi lebih informatif untuk diterima.

Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban aparatur pemerintah yang masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan masih tidak jelas ruang lingkup dengan penggunaannya. Secara teoritis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal maupun eksternal. Dan juga kecenderungan konsep akuntabilitas yang masih cenderung menekan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*selected officials*) namun kurang menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas. (Vidyasari, 2021)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Khaliza Chairani (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davit Agus Prakoso (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitan yang dilakukan oleh Tika Septiningtyas (2017). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain akuntabilitas, transparansi juga dapat berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya keterbukaan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat mudah mengetahui informasi yang diberikan oleh pemerintah secara akurat dan memadai dengan mudah. Dengan adanya transparansi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan akuntabel.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Davit Agus Prakoso (2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol (2020). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi aparatur keuangan. Kompetensi aparatur adalah kemampuan aparatur untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Aparatur yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai negeri khususnya yang terkait dengan anggaran dan sub bagian akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memberi

gambaran seluruh informasi keuangan pemerintah daerah mulai dari perencanaan anggaran hingga informasi realisasi anggaran yang akan disajikan oleh Pemerintah daerah.(Darwin, 2021)

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan aparatur yang memahami dan kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus diperhatikan seperti pendidikan dan pelatihan. Karena kedua hal tersebut akan mempengaruhi kompetensi aparatur dalam penyusunan laporan keuangan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan dengan latar belakang akuntansi akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwianti Radikha Putri (2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khadijah Darwin (2021). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalni (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan suatu pengawasan oleh kepala pemerintahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan yaitu dengan sistem pengendalian internal. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas di Kota Bekasi. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian internal semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas LKPD.(Pebriani, 2019)

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2021. Jumlah tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.774 senilai Rp8,26 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1,94 triliun, potensi kerugian senilai Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,55 triliun. Hal ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021.(bpk.go.id, 2021)

Berdasarkan hal tersebut sistem pengendalian internal di Indonesia masih belum maksimal dan masih harus ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK. Sistem pengendalian internal sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena dengan meningkatnya sistem pengendalian internal yang baik maka akan mengatasi kualitas LKPD yang masih rendah.

Sistem Pengendalian Internal di Kota Bekasi masih sangat lemah, karena masih banyaknya temuan yang ditemukan oleh BPK. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk ditangani oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi aparatur yang paham akuntansi pemerintahan menjadi salah satu penyebab kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi menurun. Pemerintah Kota Bekasi masih harus banyak melakukan perbaikan agar kualitas laporan keuangan nya semakin meningkat sehingga dapat mencapai pemerintahan yang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi diantaranya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Indria Nurani (2018). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra dan Rani (2020). Hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul dan Wina (2021). Hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut dan beragamnya hasil penelitian terdahulu sehingga membuat peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian kembali dan menambahkan variabel moderasi karena adanya fenomena mengenai sistem pengendalian internal di Kota Bekasi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel yang diteliti dengan mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bekasi).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
6. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bagi OPD di Kota Bekasi

Bagi OPD di Kota Bekasi diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam penyajian laporan keuangan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada pemerintah Kota Bekasi.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah pegawai yang minimal bekerjanya 1 tahun, pegawai yang pendidikan terakhirnya minimal D3, berkompeten dalam bidang keuangan, serta mampu menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bekasi).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang meliputi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial